

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemandirian keuangan daerah adalah salah satu kondisi dimana dalam proses penyelenggaraan pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah suatu daerah dilakukan secara mandiri yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah guna memenuhi seluruh kebutuhan belanja modal. Semakin besar kebutuhan yang dapat dipenuhi maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerahnya (Suhandak dan Triaklasono, 2007). Sebaliknya semakin kecil belanja yang di penuhi dengan pendapatan asli daerah, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dan menciptakan kemandirian daerah.

Oleh karena itu dalam rangka mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah mengadakan pembangunan melalui sarana dan prasarananya, pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa (Halim, 2001).

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di wilayah perbatasan Timor Leste yang semenjak tahun 2001 bersama daerah lain diberikan hak otonomi. Sebagai daerah perbatasan, isolasi fisik akan ketersediaan tingkat infrastruktur masih terbatas dan isolasi sosial ekonomi masyarakat masih tinggi. Namun demikian otonomi yang diberikan tanpa melihat kesiapan kabupaten Belu sebagai daerah otonom yang mandiri dalam membiayai pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana dalam penelitian Oki (2019) disebutkan bahwa dampak otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat terkesan terlalu cepat tanpa adanya suatu kesiapan matang terlebih dahulu baik dari pemerintah pusat sebagai pemberi hak otonomi maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana,

Kondisi total pendapatan asli daerah Kabupaten Belu semenjak hak otonomi diberikan masih sangat kecil kontribusi. Dominasi keuangan daerah bersumber dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan kata lain, ketergantungan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah masih sangat tinggi. Sekalipun demikian, namun upaya nyata Pemerintah Kabupaten Belu memanfaatkan potensi sumber daya lokal terus mengalami inovasi.

Hasil penelitian terdahulu oleh : A.A.N.B Dwinandara tentang “Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di propinsi Bali Tahun 2002-2006” Alat analisis yang digunakan adalah Rasio

Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektifitas Keuangan Daerah.

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Daerah otonom Kabupaten/kota Bali dalam periode tersebut masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif dan sangat efektif. Serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas keuangan (EKD) berkisar dari 75,01% sampai dengan di atas 100%.
2. Daerah otonom Kabupaten/kota di Bali dalam periode dua tahun terakhir masuk dalam kategori kemandirian keuangan yang sedang (rasio KKD lebih dari 50% sampai dengan 75%) dan rendah (rasio KKD lebih dari 25% sampai dengan 50%) masing-masing hanya satu Kabupaten/kota, sedangkan sisanya (tujuh kabupaten) masuk kategori kemandirian keuangan yang sangat rendah (rasio KKD 1% sampai dengan 25%). pada dua tahun awal, Kabupaten Bandung masuk kategori kemandirian keuangan tinggi (rasio KKD lebih dari 75% sampai dengan 100%), tetapi menurun pada dua tahun terakhir.
3. Pada tahun 2006, dibandingkan dengan tahun 2002, trend efektivitas keuangan daerah otonom Kabupaten/kota propinsi di bali semakin baik walaupun masih ada yang di bawah 100%, seperti Kabupaten Gianyar, Buleleng dan Denpasar.
4. Trend kemandirian keuangan Jembrana arahnya sangat baik dibandingkan, tiga kabupaten lain, yaitu Tabanan, Gianyar, dan Bandung menunjukkan trend baik, sedangkan sisanya lima kabupaten trend kemandiriannya cenderung berkurang dibandingkan dengan tahun 2002.

Penelitian berikutnya di lakukan oleh Ana Dwi Kurniawati (2004) dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Perbandingan Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)”. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo dari sisi keuangan belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah. Hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap TPD yang rendah sekali baik pada era sebelum maupun sesudah otonomi daerah. Tingkat kemandirian kabupaten Sukoharjo hanya sebesar 12,65% dengan pola hubungan instruktif, sedangkan rasio PAD dan bagi hasil terhadap TPD baik pada era sebelum maupun sesudah otonomi daerah masih sangat kecil.

Kabupaten Belu dalam data APBD mengalami kenaikan selama tahun 2016 hingga tahun 2020, seperti yang tercantum dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	816.442.053.5 69,95	959.717.412.27 7,44	926.095.278.6 90,83	972.546.394.6 99,98	933.950.338.799 ,25
Pendapatan asli daerah	74.823.080.56 4,95	101.246.072.21 5,34	88.592.824.57 4,83	86.449750.930 ,98	85.079.640.923, 64
Dana perimbangan	676.380.888.4 19,00	779.291.768.00 9,00	719.295.914.9 50,00	743.591.609.1 15,00	670.079.457.573 ,00
Lain-Lain pendapatan Daerah Yang Sah	65.238.084.58 6,00	79.179.572.053, 10	118.206.539.1 66,00	142.505.034.6 54,00	178.791.240.302 ,00
Belanja	834.489.268.7 73,00	939.748.398.80 6,39	948.137.256.2 30,40	992.180.923.7 15,74	960.175.047.336 ,60
Belanja Tidak Langsung	442.192.384.1 68,00	492.568.482.14 7,00	442.833.384.2 73,00	458.211.282.4 60,00	501.005.413.706 ,00
Belanja Langsung	392.296.884.6 05,00	510.179.916.65 9,39	505.303.871.9 57,40	533.969.641.2 55,74	459.169.633.630 ,60

Sumber : BPKAD Kabupten Belu

Dari data tersebut dapat diketahui antara tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi kenaikan pendapatan dengan rata-rata 7,47%. Kenaikan tertinggi terdapat pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Begitu juga dengan belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata 7,78%. Dengan belanja langsung merupakan kenaikan paling tinggi dalam komponen belanja daerah.

Dari data tersebut menandakan bahwa pembangunan daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga perlu meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk dapat memenuhi pengeluaran pemerintah, maka daerah perlu menggunakan potensi daerah yang tersedia dengan tidak mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2016-2020”**

1.2 Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2016-2020”**.

1.3 Persoalan Penelitian

- a. Apakah kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu?
- b. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu.

\

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk manfaat akademik maupun manfaat praktis :

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan ekonomi serta sebagai referensi kepustakaan mengenai kemampuan keuangan daerah Kabupaten Belu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peran pemerintah Kabupaten Belu dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien dan efektif demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.